



Buletin

ACCESS

Media Publikasi Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Tahap II

Fokus

Menghidupkan Kekuatan Ekonomi Perempuan

Wawancara: Dra. Hj. Ratningdiah, MH

Strategi Tepat Untuk Keadilan Perempuan

Pojok Kebijakan

Agar Pertambahan Tak Dilakukan Sembarangan

Mari Optimis Menghadapi Tantangan Baru

Meninggalkan tahun 2010, kami ingin menyampaikan kabar baik tentang Buletin ACCESS. Kerja sama Australian Community Development and Civil Society Strengthening (ACCESS) Tahap II dengan Sloka Institute dalam pengelolaan Buletin dilanjutkan hingga Juni 2012 nanti. Perpanjangan ini merupakan tindak lanjut dari survei pembaca di mana hampir semua responden memberikan komentar positif terhadap kinerja kami. Sebagai ungkapan terima kasih atas respon tersebut, kami akan menyampaikan sebagian hasil survei di sini.

Salah satu masukan paling banyak untuk Tim Redaksi Buletin adalah agar jumlah terbitan Buletin diperbanyak tiap tahunnya, dari tiga kali jadi empat atau bahkan enam kali. Malah, ada yang mengusulkan agar Buletin terbit tiap bulan. "Buletin ACCESS sebaiknya terbit setiap bulan sehingga semua mitra ACCESS mendapatkan informasi atau sharing informasi sejauh mana perkembangan kegiatan mitra di Indonesia," tulis salah satu responden. "Kami harap Buletin ACCESS tidak hanya pada komunitas atau mitra ACCESS tapi juga bisa dibagikan di sekolah, kampus, dan lain-lain," tulis responden lainnya.

Terima kasih sekali atas masukan-masukan tersebut. Kami sangat menghargainya. Namun, mohon maaf kami



Website ACCESS Tahap II untuk melihat profil, program, maupun kegiatan ACCESS Tahap II dan mitra-mitranya.

belum bisa memenuhinya karena keterbatasan sumber daya. Untuk saat ini, semoga terbitan tiap empat bulan sekali sudah cukup. Kalau butuh informasi lebih sering dan lengkap, pembaca sekalian bisa mengakses website ACCESS Tahap II, www.access-indo.or.id.

Tantangan ke depan memang itu, mengoptimalkan penggunaan media online, seperti website dan blog, untuk bisa mempublikasikan laporan kegiatan maupun program. Karena itu pula tiap kali Tim Redaksi Buletin ACCESS melakukan liputan, kami selalu memberikan pelatihan singkat tentang pengelolaan media online. Namun, pelatihan ini tak terbatas pada saat kami liputan. Kami pun dengan senang hati memberikan pelatihan untuk pembaca agar semakin mudah mengakses ataupun mempublikasikan informasinya. Sebab, kami yakin, informasi adalah kekuatan. [Redaksi]

Daftar Isi

- 02. Dapur Redaksi | Daftar Isi
- 03. Surat Pembaca | Interaksi
- 04. Editorial
- 10. Wawancara
- 11. Opini
- 12. Galeri
- 14. Pojok Kebijakan
- 15. Inspirasi
- 16. Kabar Lapangan
- 18. Jaringan
- 19. Referensi
- 20. Update
- 22. Profil
- 23. Selingan

Melalui kelompok, perempuan di Bima, Nusa Tenggara Barat tak hanya memperoleh keterampilan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi tapi juga menghapus kekerasan dalam rumah tangga. **Fokus - Halaman 05-09.**



Buletin ACCESS adalah media publikasi program dan kegiatan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Buletin ini terbit empat bulan sekali dengan target pembaca dari kalangan masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, serta kalangan lain yang relevan dengan program ACCESS Tahap II untuk mewujudkan tata pemerintahan lokal yang demokratis.

TIM BULETIN ACCESS. **Pemimpin Redaksi** Direktur Program ACCESS Tahap II. **Redaktur Pelaksana** STO MEL ACCESS Tahap II. **Kontributor** Staf ACCESS Tahap II dan Mitra. **Koordinator** Anton Muhajir. **Reporter** Ni Komang Erviani. **Editor** Luh De Suriyani. **Layout** Agus Sumberdana. **Kartunis** Syamsul "Isoul" Arifin.

Alamat Redaksi
Jalan Noja Ayung No. 3, Gatsu Timur. Denpasar 80237 Bali

Telp. +62-361-7989495 | **Fax.** +62-361-462976
SMS 08179701808 **Email:** info@sloka.or.id | www.sloka.or.id



Saya membaca Buletin ACCESS Edisi V/September 2010, ternyata *Outcome Mapping: Jejak Perubahan Menuju Keberhasilan* telah dipublikasikan oleh ACCESS. Buku itu menarik dan sangat relevan dengan perkembangan metodologi perencanaan program. Oleh karena itu, bisakah saya minta satu buku tersebut? Senang kalau saya diberi gratis meski tetap siap untuk mengganti biaya cetaknya jika diperlukan.

Sebelumnya terima kasih, semoga saya bisa mendapatkan buku tersebut.

Putra Suardika
via email.

Pak Putra yang terhormat. Buku tersebut bisa diambil di kantor ACCESS Tahap II seperti di alamat Buletin. Silakan kontak ke sana terlebih dulu. Terima kasih.

Dengan hormat.

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa pengiriman Buletin ACCESS Edisi II dan Edisi IV sudah kami terima dan akan kami masukkan koleksi perpustakaan Percik. Terima kasih atas pemberian tersebut.

Agus Widodo, Staf Perpustakaan Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik). Jl. Pattimura Km 1, Kampung Percik, Turusan, Salatiga, Jawa Tengah

Hai, Tim Redaksi.

Salam kenal. Kami pendamping lapangan sangat tertarik dengan artikel-artikel yang ada di Buletin ACCESS. Artikel dalam buletin ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Tambora, Nusa Tenggara Barat. Bisa tidak kami ikut bergabung untuk sharing pengalaman dalam proses pendampingan terkait pengelolaan sumber daya alam?

Salam.

Siti Nurrahma, Forum Masyarakat Kawasan Tambora.
Via email.

Bu Siti, setiap pembaca Buletin ACCESS justru disarankan untuk terlibat melalui artikel atau hanya sekadar merespon materi yang ada. Artikel atau respon itu pasti akan kami muat kalau memang layak. Salah satunya, artikel Bu Siti di edisi kali ini. Terima kasih sudah berbagi.

Interaksi

Perempuan Harus Terlibat Mencari Solusi

Dalam karir perempuan yang utama adalah dukungan keluarga. Ini yang jadi momok dalam persoalan perempuan. Jika ada anak yang tak berhasil, misalnya dalam sekolah, pasti yang disalahkan istri. Inilah kegagalan sistem komunikasi antarwarga dan keluarga tentang peran perempuan. Muncul anggapan kalau perempuan berdaya kemungkinan bisa menelantarkan keluarga. Ini anggapan salah.

Keadilan bagi perempuan masih harus terus dikejar. Saya beruntung karena punya pasangan tepat untuk mendukung saya mengambil peran. Kalau saya bahagia, kenapa kebahagiaan ini tidak saya bagi pada perempuan lainnya? Ini yang harus dijadikan gerakan bersama untuk memajukan perempuan. Misalnya, advokasi kecurangan Pemilu yang dialami caleg-caleg perempuan, advokasi Perda Perlindungan Anak dan Perempuan, *trafficking*, dan lainnya. Kalau kita tidak berjuang dan menunjukkan bisa memecahkan masalah, kita belum berdaya.

Perlu ada aksi dukungan publik bagi caleg perempuan yang dicurangi. Walau bukan kita korbannya, kita harus bantu caleg melaporkan kecurangan-kecurangan ini. Selain di isu politik dan kekerasan, keterlibatan

perempuan juga sangat penting di bidang adat. Untuk beberapa kelompok masyarakat, adat masih berperan sangat penting dalam berbagai kebijakan. Di Bali misalnya ada Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menaungi desa-desa adat.

Dengan masuk ke MUDP, ada banyak hal strategis yang bisa memperbaiki kebijakan yang tidak setara selama ini pada perempuan di Bali. Misalnya dalam pernikahan, pengasuhan anak, dan hak waris. Sekarang, meningkatnya jumlah perempuan menjadi anggota MUDP menghasilkan keputusan yang sangat penting tahun ini. Contohnya perempuan sekarang punya hak waris walau jumlahnya lebih kecil dari anak lelaki. ■

Luh Putu Anggreni, S.H.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bali dan pendiri Forum Mitra Kasih Bali.



Topik Interaksi edisi berikutnya: Membangun keterbukaan informasi di Badan Publik.

Berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tiap Badan Publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. UU ini sudah berlaku efektif sejak Mei 2010 lalu. Namun, sudahkah Badan Publik, termasuk lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan keterbukaan itu? Kirimkan pendapat Anda melalui surat, SMS, ataupun email ke redaksi Buletin ACCESS.

Menguatkan Ekonomi Perempuan untuk Memengaruhi Pembangunan

Pengamat pembangunan internasional, Gita Sen menyatakan, menerapkan perspektif gender berarti mengakui bahwa perempuan berdiri di persimpangan antara ranah produksi dan ranah reproduksi. Sen mengajak pekerja pembangunan memerhatikan dua ranah di atas untuk meringankan beban perempuan dan melahirkan strategi lebih inovatif.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan prinsip dasar ACCESS Tahap II, yaitu Inklusi Gender dan Sosial atau Gender and Social Inclusion (GSI). Prinsip ini memberi perhatian khusus pada pemberdayaan dan pelibatan perempuan, orang miskin, kelompok terpinggirkan, serta kaum muda dalam tata pemerintahan lokal yang demokratis. Dengan demikian mereka dapat menuntut haknya serta mewujudkan kebutuhan dan prioritas terhadap pembangunan secara lebih efektif.

Pada kenyataannya terdapat perbedaan kebutuhan, prioritas dan aset antara perempuan dan laki-laki maupun partisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat. ACCESS Tahap II mendorong penerapan langkah-langkah baik praktis maupun strategis untuk memperkuat peran perempuan melalui rencana aksi yang dijalankan mitra-mitranya.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara memberikan afirmasi bagi kelompok-kelompok tersebut dan memastikan selalu terjadi keseimbangan antara laki-laki-perempuan dalam tiap tahapan proses. Langkah praktis juga dilakukan dengan memastikan kepentingan kelompok-kelompok yang terhambat aksesnya terhadap sumber-sumber kehidupan bisa terakomodir dalam setiap proses pembangunan dan memperoleh manfaatnya.

Penguatan peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga merupakan salah satu bentuk tahapan praktis untuk memastikan perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi dan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Dukungan terhadap usaha-usaha ekonomi perempuan secara individu maupun kelompok merupakan jalan bagi perempuan untuk berbagi informasi, ketrampilan dan pembelajaran. ACCESS Tahap I maupun Tahap II telah mendukung peningkatan kapasitas bagi setidaknya 264 organisasi warga. Sepertiga di antaranya adalah kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan ekonomi. Pembelajaran di lapangan menunjukkan peningkatan



Oleh
Nehik Sri Hidayati
Senior Technical Officer
Community Engagement
and Governance

ekonomi perempuan menjadi jalan bagi keterlibatan mereka dalam memengaruhi ruang-ruang publik yang lebih strategis.

Secara strategis, ACCESS Tahap II mendukung penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang meningkatkan peran serta kedudukan dan kualitas perempuan. Kami juga mendukung upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden no 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Di tingkat daerah, ACCESS Tahap II mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah yang memuat pedoman strategi pengintegrasian perspektif gender kedalam proses-proses pembangunan yang sama ditingkat daerah.

Kebijakan di atas merupakan metamorfosis dari pendekatan-pendekatan pembangunan di Indonesia. Dari semula menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan kemudian menggunakan perspektif pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.

Tantangan bagi mitra ACCESS Tahap II di 16 kabupaten adalah memastikan penguatan ekonomi perempuan mampu mendorong distribusi sumber daya dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Di ranah lebih strategis adalah memastikan bahwa perempuan terlibat dan dapat memengaruhi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan desa. ■



Menghidupkan Kekuatan Ekonomi Perempuan

Di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) peran perempuan semakin menunjukkan kemajuan. Dari semula hanya berperan pada kerja-kerja reproduktif, kini mereka semakin produktif.

Hal ini menunjukkan sumber daya perempuan memiliki potensi berperan dalam pembangunan. Perempuan memiliki ketrampilan, ketekunan, dan mampu membagi waktu. Namun, di sisi lain di depan mereka masih ada tabir penghalang: proses sosial dan budaya.

Dari fenomena ini lahirlah Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga (FP3M) di Bima. Forum ini peduli pada isu perempuan, orang miskin dan kelompok marginal. FP3M mendampingi 14 kelompok usaha ekonomi rumah tangga yang semuanya dikelola ibu-ibu. Pada Agustus lalu kelompok ini berkembang menjadi 18 kelompok. Anggotanya rata-rata berpendidikan SD. Bahkan ada yang hanya mengikuti kejar paket A (setara SD).

Dahlia Jufri, pendiri FP3M, mengatakan proses pembelajaran dimulai dengan pertemuan-pertemuan kelompok kecil. FP3M juga tak terbentuk begitu saja, karena sebelumnya para perempuan desa di Madapangga sudah melaksanakan sejumlah program dari berbagai pihak. Salah satunya yang dikoordinir Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER), lembaga nirlaba di Bima.

Hingga kemudian ada 14 kelompok perempuan aktif yang berkomitmen terus mengasah kemampuan walau sejumlah program telah usai. Misalnya dengan pertemuan rutin dan berbagi informasi. "Saya juga cuma punya modal dengkul," kata Dahlia.

Hasil kerja forum ini mulai diakui banyak pihak, termasuk oleh kepala desa. "Saya percaya perempuan bisa makin kuat dan berdaya," ujar Ismail Abubakar, pengurus Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Ismail kini malah tertarik mengikuti beberapa pertemuan kelompok perempuan ini, yang sifatnya juga terbuka pada warga laki-laki.

Rengginang dan ayam

Desa Ndano artinya kubangan. Jaraknya sekitar 51 km dari Kota Bima. Sekretariat FP3M di desa ini. Kantornya menggunakan ruang sekolah pendidikan anak usia dini yang dikelola anggota forum ini. Jumlah siswanya sekitar 30 orang. Pada pertengahan November lalu, tak banyak anak-anak sekolah. "Ada yang ikut orangtuanya bekerja di ladang. Sekarang musim menyiapkan lahan," ujar Dahlia.

Di lantai, terhidang tiga jenis panganan khas simbol kebanggaan kelompok jajan, salah satu kelompok

Foto: Luh De Suriyani.



Usaha rumah tangga lebih besar menghasilkan keuntungan setelah perempuan belajar rencana usaha.



Kelompok perempuan usaha ternak masih menghadapi tantangan sulitnya mengakses modal usaha dari bank maupun pemerintah

ekonomi rumah tangga di FP3M. Ada kue bunga dari beras berbentuk tiga kelopak bunga, ada bolu panggang, dan rengginang londe. Kue terakhir ini istimewa cita rasanya karena bahan baku direndam dalam sari ikan bandeng.

“Ini rengginang khas Madapangga. Saya baru selesai membuat pesanan dari Banjarmasin,” sahut Farida Ahmad dengan bersemangat, diikuti anggukan teman-teman satu kelompok jajan lainnya. Pesanan ini menurutnya datang tiba-tiba dan bersifat musiman saja. Farida bercerita, tiap kelompok kini bisa mengolah 42 kilogram beras untuk disimpan selama satu minggu. Bahan beras akan dibuat rengginang mentah yang sewaktu-waktu bisa digoreng untuk dijual.

“Kalau ada acara kawin atau selamat, dua hari stok itu habis,” lanjut Farida. Sebelum bergabung dengan FP3M, la tak tahu persis berapa keuntungan yang didapatnya. Karena itu la tak memerhatikan seberapa besar potensi pengembangan usaha dari membuat rengginang.

“Sekarang, kami sudah belajar hitung-hitungan biaya

produksi. Ternyata potensi usaha ini besar setelah belajar bussiness plan,” tambah anggota jajan Kelompok Lestari dari Desa Dena ini.

Selain kelompok jajan, FP3M juga punya kelompok ternak. Salah satu anggotanya adalah Farida. Selain usaha jajanan, Farida juga mengembangkan usaha ternak. Ia baru dua tahun memulai usaha peternakan ayam broiler, yang lokasinya menyatu dengan rumahnya. Saat ini ia memelihara sekitar 300 ekor ayam. Jika semua ayamnya sehat, tiap bulan ia mengantongi penghasilan sekitar Rp 600.000 kotor. Akan lebih besar penghasilannya, jika banyak yang terjual secara eceran. Karena harganya jauh lebih besar dibanding penjualan partai ke perusahaan hewan potong.

Farida kini fasih membuat hitung-hitungan biaya pokok dan margin keuntungan dari usaha ternaknya. “Jika dijual partai, penghasilan sekitar Rp 600.000, tapi kalau eceran bisa sampai lebih Rp 1.000.000,” sahutnya tentang penghasilan

dari 200 ekor ayam yang dipanen pada usia rata-rata 38 hari ini.

Karena ia kini anggota kelompok, Farida tak kerepotan memelihara ternaknya. Pada suatu siang yang terik itu misalnya ia dibantu tiga rekan perempuan sesama peternak lainnya membersihkan wadah-wadah air minum ayamnya, mengatur pemberian pakan, dan lainnya. Sebagai perempuan, meski bekerja mengurus ternak, Farida juga masih mengurus anaknya. Anak perempuannya, Ifo yang berusia 3,8 bulan merengek minta digendong ketika dia sedang di tengah kandang.

Sebagai peternak baru, ia terus ingin menambah jumlah bibit. Namun, dia terkendala modal dan sulitnya bibit. Perusahaan yang jual maunya langsung jual ribuan, dalam jumlah besar. “Ini modalnya besar,” ujar Farida, 30 tahun, serius. Untuk mengakses modal usaha, ia tak punya surat berharga sebagai jaminan. “Rumah-rumah di sini kebanyakan tak punya sertifikat, masih hak pakai istilahnya,” tambahnya.

Dahlia mengatakan akan berusaha membuka jejaring ke pihak penyedia modal seperti perbankan dan ahli-ahli peternakan untuk memajukan kelompok peternak. “Kami masih punya banyak hal yang harus dilengkapi. Misalnya

izin industri, jaminan, wah banyak sekali yang harus diurus," ujarnya.

Kemandirian ekonomi, menurut Dahlia, juga berpengaruh pada tawar menawar dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya perempuan kelompok jajan tak harus ikut ke ladang ketika sedang membuat pesanan. Selain itu, sejumlah anggota FP3M juga membuat beragam kegiatan pengembangan diri seperti lomba pidato, diskusi kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya.



Foto: Luh De Suriyani.

Bekerja di rumah membuat ibu-ibu bisa mendampingi anaknya bersekolah, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD). FP3M masih terus mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang juga menjadi tempat nongkrong anggota FP3M berbagi untuk terus berdaya.

Pelayanan publik

Jika anggota FP3M lebih banyak melaksanakan program untuk peningkatan ekonomi, maka organisasi lain, Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud), berusaha meningkatkan peran perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Ide ini didasari pemikiran bahwa peningkatan peran perempuan di rumah tangga secara otomatis akan berpengaruh pada kepekaannya melihat persoalan sekitar. Keterlibatan perempuan pada persoalan desa, ternyata berpengaruh besar pada transparansi dan akuntabilitas desa. Solud menggerakkan kelompok-kelompok perempuan 10 desa di 8 kecamatan di Kota dan Kabupaten Bima.

"Secara struktural peran perempuan terlembaga dalam PKK, posyandu, atau majelis taklim. Namun mereka belum dilibatkan dalam keputusan penting lainnya seperti perencanaan desa yang masih didominasi laki-laki," ujar Dedy Mawardi, Direktur Solud. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pemetaan awal di 10 desa dengan metode kuesioner baru-baru ini. Hasilnya belum dianalisis, namun dari jawaban-jawaban yang masuk terbaca jelas, ada kebutuhan-kebutuhan dasar menggelisahkan.

Pertanyaan untuk sekitar 200 perempuan di 10 desa tersebut adalah pelayanan publik meliputi kesehatan, pendidikan, pelayanan publik nonfisik, dan pendidikan.

Juga ada aspek program perlindungan anak dan perempuan, dan apa yang bisa dilakukan perempuan untuk mendorong semua itu. Para perempuan juga diminta mengidentifikasi apa saja persoalan perempuan dan anak yang ada di sekitar mereka. Misalnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, angka putus sekolah, anak yang ditelantarkan, dan lainnya.

Responden perempuan di Desa Bontokape, sebagai contoh, menjawab bahwa rata-rata fasilitas sudah ada namun tak dikelola dengan baik untuk melayani publik. Misalnya, tempat Posyandu dan Puskesmas pembantu tersedia namun ada beberapa kegiatan yang kini menghilang atau tak disediakan. Bubur bagi balita, imunisasi dan timbangan balita tidak cukup. Pembagian vitamin juga hilang.

Sarana mandi, cuci, kakus (MCK) disebut kondisinya buruk. Sementara tempat pembuangan sampah tidak baik karena dilakukan di sungai. Masalah lain yang teridentifikasi di Bontokape adalah kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak merata pada warga miskin. Jawaban yang rata-rata sama juga muncul di desa-desa dampingan lain Solud. Seperti Desa Naru, Talabiu, Kombo, Soro, Bugis, Nunggi, Nipa, dan Panda.

Untuk mulai melibatkan peran perempuan dan komunitas marginal lain seperti kaum miskin, Solud memobilisasi perempuan dengan membuat Gerakan Peduli Perempuan Desa (GPPD) di 10 desa itu. Mereka sedang menyusun pula buku Pedoman Program Pelayanan Publik serta Perlindungan Anak (P4A).

■ Luh De Suriyani

Agenda

- Loklatih Pengembangan Obat-obatan Tradisional 14-17 Februari 2011 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
- Pelatihan Jurnalistik untuk Mitra 27-30 Februari 2011 di Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat
- Pelatihan Kepemimpinan Perempuan 11-15 Maret 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur
- Pelatihan penulisan human interest dan most significant change (MSC) 9-17 Februari di Sumba Barat dan Sumba Timur
- Loklatih Perencanaan Tahunan 14-18 Februari 2011 di Bali



Foto: Luh De Suriyani.

Untuk mengadvokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, FP2KK membicarakan isu tersebut secara terbuka.

Menguatkan Perempuan Mengurangi Kekerasan

Ida Ariati Arahman, 50 tahun, berteriak-teriak menirukan suara perempuan yang sedang kalang kabut karena melihat suaminya selingkuh.

"Aduh, aduh, suami saya tidur dengan perempuan lain," seru Ida sambil bangkit dari kursi dan berlari-lari di depan teman-temannya yang sedang mendiskusikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ida seperti melakukan rekonstruksi kasus KDRT pada sebuah diskusi November lalu di Sekretariat Forum Perempuan Peduli Korban Kekerasan (FP2KK), Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ida dan beberapa pendamping petugas lapangan lain terlihat fasih menceritakan satu demi satu kasus yang pernah didampingi relawan FP2KK.

Selama ini banyak yang menganggap KDRT adalah persoalan domestik sehingga tidak patut untuk dibicarakan secara terbuka. Kasus KDRT pun disembunyikan atau dibicarakan dengan bisik-bisik. Tapi tidak bagi perempuan Desa Kempo. Mereka malah menjadikan KDRT untuk bahan studi kasus. Mereka seperti tak tabu lagi membicarakan kasus KDRT dan siapa saja korbannya.

Atika, pendamping di Desa Soro dan Kobo, Dompu belajar mendampingi korban kekerasan dari pengalamannya sendiri. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh sesama perempuan.

Suatu ketika, Tika, panggilanannya tiba-tiba kepalanya dihantam dengan sapu bertubi-tubi oleh seorang perempuan yang tak dikenalnya. Tika terjengang dan tidak sempat melawan. Puskesmas tak mampu mengobati trauma fisik dan mental yang dideritanya, hingga dirujuk ke rumah sakit setempat dan menjalani rawat inap.

"Sampai sekarang saya tidak tahu apa alasan dan siapa sebenarnya perempuan itu. Saya korban fitnah," seru Tika. Dengan pendampingan rekan-rekannya, pelaku dilaporkan ke polisi sampai proses pengadilan. "Saya awalnya cuma lihat-lihat saja dari luar ketika ada rapat-rapat kelompok (FP2KK) ini. Eh, malah saya yang mengalaminya sendiri," ujarnya mengenang masa lalu.

FP2KK kini meluaskan jangkauan untuk menyebarkan semangat anti-kekerasan di 7 desa di Kecamatan Kempo, Dompu, yaitu Desa Dorokobo, Ta'a, Kempo, Soro, Konte, Tolokalo, dan Songgajah.

Ida Wahyuni, Koordinator FP2KK mengatakan pemicu kasus kekerasan rata-rata karena ekonomi. Penghasilan keluarga yang fluktuatif karena hasil pertanian tak menentu membuat sejumlah risiko, salah satunya pertengkaran yang berakhir pada kekerasan.

Namun, belum ada data kekerasan dan dokumentasi sehingga belum ada gambaran korban. "Proses advokasi digiatkan lagi, dengan diskusi atau bedah kasus di kelompok," ujar Yuni, panggilan akrabnya.

Tiap kelompok diskusi terdiri dari sekitar 20 orang. Agendanya diselaraskan dengan program kesehatan di Posyandu atau peningkatan ekonomi rumah tangga. "Warga yang mengalami kekerasan kini tahu ada rekannya yang bisa membantu agar tak disimpan sendiri," tambah Huwayah, perempuan 28 tahun dari Desa Songgajah. Huwayah mendampingi sebayanya di Desa Songgajah, Tolokalo, dan Konte.

Kelompok perempuan FP2KK punya cara unik menjaga kekerabatan sekaligus membuat tabungan abadi untuk bantuan korban kekerasan. Mereka membuat arisan yang iurannya dikumpulkan secara rutin oleh rekan perempuan yang berjualan kue-kue dari rumah ke rumah.

Ida Ariati Arahman menceritakan iuran arisan ini ternyata sangat bernilai. Misalnya tiap anggota menyeter iuran Rp 1.000 per hari. Setelah terkumpul Rp 1 juta dalam satu bulan, uang baru bisa ditarik. Sebelum dikocok, harus disimpan sedikitnya Rp 30 ribu untuk simpanan. Simpanan inilah yang digunakan sebagai dana suka duka bantuan bagi korban kekerasan atau lainnya.

Tantangan saat ini adalah mengusahakan pembebasan biaya visum korban yang masih dikenakan sekitar Rp 50.000 di Puskesmas setempat. "Sebelumnya kami berhasil meminta persediaan oksigen yang tidak ada di puskesmas," sebut Huwayah. Sementara soal mekanisme pelaporan ke polisi atau penyelesaian berkas dinilai tidak ada masalah.

Selain laporan ke polisi untuk kasus kekerasan berat, mekanisme pemberian sanksi internal juga diberlakukan. Misalnya, saksi pemecatan sebagai anggota forum bagi pelaku. Pernah, seorang anggota perempuan yang dipecat karena terbukti melakukan perselingkuhan.

Pendampingan dan penyadaran soal KDRT masih panjang. "Isu ini kan berkaitan erat dengan ekonomi dan kesehatan. Sosialisasi dan rapat juga harus melibatkan laki-laki atau pemimpin desa," kata Ida Wahyuni.

Program pemberdayaan perempuan melalui ekonomi, menurut Arief Mahmudi, Koordinator ACCESS Tahap II untuk wilayah NTB, karena selama ini kelompok miskin



apalagi perempuan hampir tidak pernah terlibat dalam proses pembangunan. "Kalaupun ada keterlibatan, itupun hanya sebatas kehadiran, belum sampai pada keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Dalam pendekatan ACCESS Tahap II, penguatan perempuan masuk dalam kerangka Gender Social Inclusion (GSI). Secara teknis, perempuan dipastikan dapat terlibat secara aktif baik dalam pengambilan keputusan maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Prinsip dasarnya adalah semua orang diperlakukan sama tanpa memandang gender atau kelas dan semua orang mendapatkan informasi mengenai proses serta keputusan mengenai program pembangunan.

Indikator keberhasilannya perempuan dan organisasi perempuan mempunyai peran penting sebagai pembela prinsip-prinsip demokratis dan dalam mendorong pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesempatan semua warga negara. Misalnya perempuan dan laki-laki memahami tata kerja pemerintah lokal untuk memperjuangkan pelayanan yang lebih baik. Seperti kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan kredit mikro. ■ **Luh De Suriyani**



Foto: Luh De Suriyani.

Dra. Hj. Ratningdiah, MH., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Strategi Tepat untuk Keadilan Perempuan

Apa yang Ibu perjuangkan melalui BPPKB?

Saya ingin memberdayakan perempuan dan anak untuk meningkatkan posisi mereka. Hal mendasar adalah mengembalikan konsep Keluarga Berencana (KB) yang sebenarnya. KB bukan sekadar berhubungan dengan alat kontrasepsi. KB justru berkaitan dengan sejauh mana perencanaan keluarga, mulai dari kapan akan menikah, kapan akan melahirkan, kapan harus tidak melahirkan, dan bagaimana mewujudkan keluarga idaman.

Apa potensi untuk mewujudkannya?

Salah satu potensi besar adalah LSM yang selalu mendorong dan menuntut hak perempuan. Kami mendapatkan dukungan semangat dan aksi-aksi nyata dari LSM. Misalnya, mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan adil gender, advokasi kasus-kasus perempuan dan anak, serta diskusi kritis pembelajaran maupun pemberdayaan. Dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur sangat membanggakan. Walaupun tidak bisa dipungkiri masih banyak juga dari pemerintah yang berada tidak peduli dan kurang memiliki perspektif. Tantangan terbesar untuk mewujudkan cita-cita ini adalah minimnya dukungan pendanaan atau anggaran dari pemerintah. Padahal bidang yang kami tangani ini merupakan investasi jangka panjang.

Bagaimana dengan pihak luar, donor?

Dukungan dari donor atau program luar sangat besar. Saat ini kami bermitra dengan donor atau program, misalnya Unicef (fokus untuk program anak), PBB (kekerasan berbasis gender), GTZ (kesehatan reproduksi), Ded (capacity building), dan beberapa program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu adalah beberapa yang memberikan dukungan financial. Kami juga bermitra dengan lembaga donor yang mendukung LSM, seperti ACCESS Tahap II.

Apa saja hasil kerja yang bisa dibanggakan?

Beberapa hasil kerja keras dengan dukungan banyak pihak, misalnya, Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang dan Perub No. 30 Tahun 2010 tentang Hak Nafkah Bagi Mantan Istri dan Anak. Ada juga Memorandum Kesepahaman (MoU) dengan 10 provinsi tentang Kekerasan, MoU Gubernur dengan Forum Kerja Pondok Pesantren (FKFPP), Tim Implementasi Gerakan 3A, kerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), dan beberapa kerja sama serta integrasi program.

Ke depannya apa yang bisa ditingkatkan?

Mengembangkan komunikasi dan interaksi antar-pemangku kepentingan dan antar proyek agar benar-benar terjadi sinergi. Kami sudah mulai melakukannya. Salah satu caranya adalah menjadikan kantor kami sebagai sekretariat atau tempat kawan-kawan berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal terutama yang terkait dengan perempuan dan anak. Harapannya, ini mempermudah pengorganisasian upaya-upaya advokasinya. ■

ACCESS Tahap II



“Mitra ACCESS perlu membangun hubungan baik dengan SKPD-SKPD terkait programnya sehingga SKPD tersebut bisa mendukung. Pasti ada dana-dana khusus untuk membangun desa.” **Yuna Manu,** Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan

Potret Kelam Perempuan di Kecamatan Pekat



Oleh **Hadijatul Qubrah**

"Keguguran di sini sudah biasa, Bu. Kami hanya butuh istirahat sebentar, minum obat-obatan tradisional. Setelah itu kami melakukan kegiatan seperti biasa," ungkap seorang ibu di Dusun Gunung Sari, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia menjawab pertanyaan saya dan teman dari Universitas Atmajaya Jakarta. Kami sedang riset tentang kepercayaan dan praktik-praktik budaya yang mempengaruhi kesehatan ibu di Kabupaten Dompus. Jawaban itu muncul karena keguguran dianggap wajar. Banyak alasan.

Pertama, pembangunan tidak merata dan tidak adil gender. Hal ini menyumbang munculnya kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu. Perempuan adalah yang pertama mengalami dan merasakan dampaknya. Potret ini bisa kita lihat di Pekat, kecamatan paling jauh dari ibu kota Kabupaten Dompus. Kondisi jalan rusak parah. Geografisnya sangat sulit.

Hampir seluruh warganya petani dan berkebun. Lahan-lahan mereka di wilayah sangat sulit. Maka, yang paling banyak menjadi korban kondisi ini adalah perempuan. Perempuan hamil, baru melahirkan dan menyusui harus melewati jalan-jalan bebatuan, menyeberangi sungai dan naik turun gunung ketika bekerja.

Kasus keguguran sangat sering dialami perempuan di Pekat. Saking seringnya, kasus-kasus keguguran di sana dianggap sebagai hal biasa dan tidak berbahaya.

Angka Kematian Ibu pada tahun 2009 di Kabupaten Dompus sebanyak 6 orang. Empat di antaranya warga Kecamatan Pekat. Dari hasil riset kami, dua perempuan meninggal karena mengunjungi kebun mereka untuk membantu suami dalam keadaan hamil tua. Mereka melahirkan di kebun di atas gunung hanya ditemani suami. Seorang lagi meninggal dalam perjalanan ke Puskesmas yang jauh dari rumah melewati jalan sangat sulit sementara sang ibu mengalami pendarahan.

Kedua, kewajiban peran domestik perempuan. Seperti sebagian besar daerah di Indonesia, di Dompus, peran-peran domestik wajib dilakukan perempuan. Ibu yang meninggal di kebun saat itu sedang menyelesaikan tugas dan peran domestiknya. Saat itu suaminya di kebun. Si Ibu harus memasak, mencuci pakaian, dan membantu bekerja kebun, meski sedang hamil. Tidak ada yang mempersoalkan kejadian ini karena mereka menganggap Ibu yang meninggal tersebut mati syahid. Dia meninggal saat melahirkan dan menunaikan "kewajibannya".

Ketiga, soal budaya. Sebagian kepercayaan dan budaya Dompus memengaruhi kesehatan ibu. Dalam kehamilan ada upacara salama loko yang bisa mempunyai pengaruh negatif. Tradisi ini berupa pemijatan oleh sando untuk memperbaiki letak bayi. Logikanya, letak bayi dalam rahim diasumsikan selalu salah, sehingga diperlukan tindakan pemijatan. Bisa jadi tindakan pemijatan itu berakibat fatal terhadap bayi di dalam rahim.

Pantangan-pantangan terkait makan dan minum juga bisa berdampak negatif. Ibu menjadi kurang gizi, padahal yang bersangkutan membutuhkan banyak energi untuk persalinan. Selama persalinan, ibu justru membutuhkan makanan bergizi untuk keperluan menyusui bayinya.

Ada kepercayaan jika partus (mengejan) yang lama terjadi karena dosa si ibu terhadap suami, ibu atau mertua. Dalam keadaan menyambung nyawa, ibu bersalin itu harus rela mendapat perlakuan "kekerasan" di mana suami, ibu, atau mertua akan menginjak kepala si ibu untuk menghapus dosa penyebab sulit melahirkan. Bahkan lebih ekstrem lagi, diminta meminum air bekas cucian kaki atau alat kelamin suami.

Kondisi sosial dan pembangunan di Kecamatan Pekat, merupakan gambaran pembangunan yang tak merata, tidak adil gender, dan tidak berkeadilan sosial. Hal ini ditambah terbatasnya informasi khususnya kesehatan, rendahnya pendidikan, dan lain-lain. ■



ACCESS Tahap II Nusa Tenggara Barat mengadakan lokakarya pengarusutamaan HIV dan AIDS tingkat provinsi. Kegiatan yang diikuti 26 peserta dari organisasi masyarakat sipil mitra ACCESS Tahap II ini diadakan pada 8 - 10 November 2010 di Hotel Jaya Karta, Mataram. Peserta belajar informasi dasar tentang HIV maupun cara menanggulangnya serta membuat rencana aksi untuk menghadapi HIV dan AIDS ini.



Sepuluh Program Officer (PO) ACCESS Tahap II berkumpul dalam PO Summit di Bali 09 -12 November 2010 lalu. Kegiatan ini merupakan ruang bagi PO untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai peran warga dan organisasi masyarakat sipil menuju tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis (TKLD). Para PO juga merefleksikan kinerja mereka memicu mitra di kabupaten masing-masing.



Pada 18-23 Oktober 2010, Tim Monitoring Review Group (MRG) melakukan kunjungan di wilayah kerja ACCESS Tahap II Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Buton dan Buton Utara. Tim mengunjungi Kelompok Tani Kaombo Labukutorende dan Kelompok Tani dan Nelayan Bunganaponda di Buton. Tim juga melihat pertemuan review Pertemuan Apresiasi Kabupaten (PAK) dan Konsultasi Ranperda Perencanaan Pembangunan Desa.



Lokakarya review hasil Pertemuan Apresiasi Kabupaten (PAK), diselenggarakan pada 19-20 Oktober 2010 di Gedung Tongano Lipu, Ereke, Kabupaten Buton Utara. Kegiatan ini diikuti perwakilan warga, organisasi masyarakat sipil (OMS), maupun unsur pemerintah. Jumlah peserta sebanyak 29 orang, terdiri dari laki-laki 10 orang dan perempuan 19 orang. Kegiatan untuk mengidentifikasi keberhasilan program dan membuat rencana aksi.



Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto membuka kegiatan Kampung Pelayanan Publik di Kelurahan Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Kegiatan yang melibatkan 66 orang dari 24 pengurus LPM ini bertujuan untuk mengawal praktek-praktek pelayanan publik berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kegiatan ini difasilitasi Patiro Jeka, mitra ACCESS Tahap II di Kabupaten Jeneponto.



ACCESS Tahap II NTB mengadakan *training of facilitator* (ToF) Sekolah Anggaran pada 8-9 September di Manggelewa dan Hu'u, Kabupaten Dompu. Sebelumnya, kegiatan ToF juga diadakan di Homestay Kartika Bali 1, Dompu dengan jumlah peserta sebanyak 16, terdiri dari 8 laki-laki dan 8 perempuan. Selain itu, ToF Sekolah Anggaran juga diadakan di Kecamatan Pekat, Pajo, Kempo, dan Kilo.



Pelatihan bagi fasilitator Vibrant Communication, Pendekatan Berbasis Kekuatan (SBA), dan Appreciative Inquiry (AI) mitra ACCESS Tahap II di Timor diadakan pada 13 – 16 Desember 2010 di Kupang. Pelatihan yang difasilitasi Inspirit ini diikuti 28 orang, 15 perempuan dan 13 laki-laki. Peserta berlatih, antara lain, strategi komunikasi, kreativitas, dan pembelajaran dengan antusias dalam suasana berbeda.



ACCESS Tahap II bekerja sama dengan Inspirit menyelenggarakan pertemuan nasional Forum Lintas Aktor (FLA) di Hotel Haris Riverview Kuta, Bali pada 23 - 25 November 2010 lalu. Pertemuan nasional ini dihadiri sekitar 60 orang perwakilan dari anggota FLA dari 16 kabupaten di mana ACCESS bekerja. Selain berbagi cerita sukses, selama kegiatan ini peserta juga bertukar pengalaman dan gagasan.

UU No 4 tahun 2009

Agar Pertambangan Tak Dilakukan Sembarangan

Agustus lalu, Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerbitkan 240 izin usaha pertambangan eksplorasi mangan. Izin ini keluar seiring maraknya pertambangan di provinsi tersebut tiga tahun terakhir. Dua pusat pertambangan baru adalah Kabupaten Manggarai di Flores dan Timor Tengah Selatan di Timor.

Dua kabupaten itu memiliki banyak sumber besi mangan, salah satu bahan pembuatan baja. Akibatnya, muncul pertambangan-pertambangan oleh warga, terutama di Kabupaten TTS. Namun, jika tak dikelola dengan baik, pertambangan-pertambangan ini bisa menjadi liar. Selain rentan menimbulkan konflik antarwarga, pertambangan liar ini juga membahayakan lingkungan. Inilah pentingnya Undang-undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

UU ini disahkan oleh DPR pada Januari 2009 sebagai pengganti UU no 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. UU lama ini dianggap oleh DPR sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. UU baru diharapkan bisa menjawab tantangan dalam usaha pertambangan di Indonesia saat ini yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Harapan itu diwujudkan dalam 175 pasal di UU ini, mulai dari perizinan, penetapan, hingga sanksi untuk pelaksana pertambangan. Salah satu perubahan penting UU ini dibanding UU yang sebelumnya adalah keterlibatan masyarakat dalam hal perizinan maupun pengelolaan wilayah pertambangan. Dalam Pasal 10 UU Pertambangan yang baru, disebutkan penetapan wilayah pertambangan harus memerhatikan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Ayat (b) pasal ini menyatakan penetapan itu juga harus memerhatikan pendapat dari masyarakat. Hal ini tidak diatur dalam UU lama.

UU No 4 tahun 2009 juga menjamin adanya kegiatan pertambangan rakyat. Untuk mendapat hak pengelolaan wilayah

pertambangan rakyat (WPR), pengelola pertambangan ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemberian izin dari Bupati/Walikota ini juga harus diberikan untuk semua aktivitas pertambangan di lokasi kabupaten/kota, baik perseorangan maupun perusahaan. Namun, sekali lagi, tetap dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Bentuk-bentuk pertambangan rakyat diatur Pasal 66. Setelah mendapat izin pertambangan rakyat (IPR), pengelola pertambangan skala kecil ini juga berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen. Pemilik IPR juga berhak mendapat bantuan modal dari pemerintah.

Dalam UU baru ini, hak warga yang menjadi korban juga memiliki hak perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 145 tentang Perlindungan Masyarakat. Secara jelas, pasal ini menyebutkan hak-hak yang bisa diterima masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Hak tersebut, antara lain memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan serta mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Adanya Pasal tentang Perlindungan Masyarakat merupakan langkah maju. Sebab, selama ini, masyarakat yang sering jadi korban kegiatan pertambangan seperti tak berdaya melawan perusahaan-perusahaan pertambangan, apalagi perusahaan transnasional. Untuk itu, Pasal 145 tersebut bisa menjadi dasar hukum jika ada masyarakat yang ingin menggugat dampak negatif perusahaan pertambangan di wilayah masing-masing. ■

Anton Muhajir

Silakan unduh materi UU tersebut di website:

www.access-indo.or.id

Pemasaran Bersama untuk Melawan Rentenir

Melalui pemasaran bersama, petani tak hanya mendapat harga komoditi lebih adil, tapi juga hidup lebih berkualitas.



Pemasaran bersama muncul dari Kelompok Kerak Bumi Damba Nilai (KKDN) di Dusun Kasipahu, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski komoditi metenya berlimpah, mereka tidak bisa menikmatinya. Harga mete mereka lebih rendah dibanding daerah lain karena isapan tengkulak dan pengijon. Pengurus KKDN bersama anggota lalu memasarkan mete langsung ke pengusaha.

Petani membawa contoh komoditi ke pengusaha lalu membandingkan satu sama lain. Pembeli dengan harga tertinggi berhak mendapatkan mete. Cara ini dinilai paling baik karena pengusaha mendapat untung sementara kelompok juga mendapat harga lebih adil sesuai kesepakatan bersama.

“Pemasaran bersama membuat masyarakat Kasipahu bersatu, mudah diajak untuk berkumpul dan mudah diatur,” ujar Gamal, Kepala Dusun Kasipahu.

Keberhasilan ini menginspirasi petani di desa-desa lain. Saat ini ada 13 kelompok dalam pemasaran bersama di delapan desa, yaitu Kawinda To’l, Oi Panihi, Oi Bura, Tambora, Sorinomo, Pekat Nangamiro dan Doropeti. Mereka membentuk Forum Pemasaran Bersama (FPB) yang kemudian berkembang menjadi Forum Masyarakat

Kawasan Tambora (FMKT). Gerakan Forum pun semakin leluasa dengan banyaknya isu yang ditangani, yaitu isu sumber daya alam, penghidupan dan kesehatan. Forum pun berjejaring dengan instansi pemerintah, pengusaha maupun dengan lembaga-lembaga lain, termasuk swasta

Dengan semakin kuatnya jaringan ini, forum mampu menaikkan posisi tawar petani baik dari segi harga juga pada kapasitas kader-kader Forum. Produk mete, jagung, dan kedelai anggota forum mendapat harga tertinggi di kecamatan dan kabupaten.

Forum saat ini seperti magnet bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Banyak kelompok bergabung, pengusaha menawarkan kerjasama dan instansi pemerintah menawarkan bantuan. Dalam waktu hanya dua tahun anggota berkembang dari 127 kepala keluarga (KK) menjadi 1.253 KK. Isu pemasaran bersama bertambah dengan isu hutan keluarga, konservasi mata air, penanganan pascapanen, hingga sanitasi.

Semua anggota Forum adalah petani. Mereka menghadapi musuh berwujud rentenir dan pengijon berlagak penolong. Rentenir bekerja seperti malaikat, menawarkan pinjaman di saat-saat petani membutuhkan. Sadar bahwa semakin lama semakin tergantung pada rentenir, petani lalu melawan.

Selain melalui Forum, petani juga mendirikan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP). UBSP memberi harapan bagi masyarakat setidaknya anggota kelompok, sedikit demi sedikit terbebas dari ketergantungannya pada pengijon. Saat ini sudah terbentuk 24 UBSP dengan total modal swadaya sebesar Rp 179.650.000.

Juni 2010 lalu di Forum mendeklarasikan berdirinya Bank Kaum Miskin Masyarakat Kawasan Tambora. “Terima kasih karena Forum telah mengajak kami masuk dalam lingkaran berbahagia, yaitu Bank Kaum Miskin,” ungkap Hermanus Mansi, Ketua Kelompok Tani Sori Sumbawa. Melalui sistem pemasaran bersama, petani telah mengangkat derajatnya sendiri. ■ **Siti Nurrahma,** *Pendamping Forum Masyarakat Kawasan Tambora*

Setelah kami berani berbicara dengan pihak sekolah tentang pungutan-pungutan itu, sekolah tidak lagi melakukannya.

Ifa, orang tua murid Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Buton.

Menguatkan Kapasitas Kader Desa



ACCESS Tahap II mendukung Program Penguatan Kapasitas Kader Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (KPPMD). Dukungan itu diharapkan menyumbang pembangunan desa di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penguatan kapasitas KPPMD dilakukan di delapan desa, yaitu Rora, Bumi Pajo, Palama, Kala, Mpili, Mbawa, dan Doridungga. Penguatan ini bertujuan menjangkau kader-kader desa yang potensial. Kader-kader terpilih tersebut selanjutnya dilatih dan dibina terkait fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, advokasi, dan lain-lain. Pemberdayaan ini menggunakan metode *Community Learning and Action Participatory Process-Gender Social Inclusion* (CLAPP-GSI) yang menekankan pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Kader-kader inilah yang akan menggerakkan pembangunan di desa masing-masing. Mereka sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat dalam Musyawarah Pembangunan Desa sehingga terbentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang partisipatif.

Kegiatan sosialisasi program berlangsung seperti diharapkan. Warna partisipatif, antusiasme, kepedulian dan keingintahuan masyarakat desa, membuat tim menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu untuk sebuah cita-cita perubahan. Kepala Desa Rora H. Kasim Sabil mengatakan akan mendukung pelaksanaan program di Desa Rora. Berbekal pengalaman itu, sosialisasi program penguatan KPPMD pun dilanjutkan di tujuh desa lainnya. Keinginan memajukan desa dan membuatnya mandiri memacu semangat berkolaborasi, menerima, dan mendukung pelaksanaan program. ■ **Darwis, KPPMD.**

Membangun Dialog dengan Pengambil Kebijakan

Keluhan warga terkait pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ditampung melalui Pusat Sumber Daya Warga atau *Community Resource Centre* (CRC). Wadah ini sekaligus tempat pembelajaran tentang pelayanan publik. Basisnya di Rukun Tetangga (RT). CRC diharapkan mendorong warga agar kritis terhadap setiap pelayanan, mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-haknya dan berinteraksi dinamis dengan berbagai pihak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Hingga saat ini, CRC ada di 4 kelurahan, yaitu Ninda La Kahaungu (Kelurahan Kambajawa), Mbuahung Papandullang (Matawai), Titu Hari (Prailiu), dan Mira



Kaddi Hari (Kambaniru). Pengurus CRC telah mengikuti penguatan kapasitas kerjasama Stimulant Institute dengan ICW dan Pattiro. Wadah ini juga bekerja sama dengan kelompok pemuda, yaitu dari Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kriswina Sumba, Pemuda Gereja Kristen Sumba Kambaniru, Orang Muda Katolik Kambajawa, dan Remaja Masjid At-Taqwa Kamalapati.

Meskipun baru terbentuk, ada beberapa hal yang dilakukan CRC, seperti mendorong warga berani berbicara tentang hak-haknya, mendatangi penyedia jasa, seperti PLN dan PDAM untuk komplain, bahkan public hearing dengan DPRD dan penyedia jasa seperti rumah sakit daerah. Hasilnya, antara lain, Kelurahan Prailiu membebaskan warga dari pungutan untuk pengurusan administrasi, Dispenduk sudah menempelkan syarat-syarat pengurusan KTP beserta biayanya di ruang pelayanan, dan banyak lagi keberhasilan lainnya. ■ **Junita Wendah Radja, Kordinator Riset dan Advokasi Kebijakan Publik Stimulant Institute.**

Keterbukaan Sekolah untuk Pendidikan Berkualitas

Pendidikan Partisipatif menuju Pendidikan Berkualitas di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan program kerja sama ACCESS Tahap II dengan The Gowa Center. Program ini mendampingi 12 sekolah dan dua baruga sayang (Balai Rujukan Keluarga dan Layanan Pembangunan). Mitra langsung program ini adalah kepala sekolah dan komite sekolah serta pengurus baruga sayang.



Kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain, sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan, lokakarya dan pelatihan tata kelola pemerintahan yang demokratis (TKLD) dan manajemen organisasi bagi mitra langsung, diskusi tematik tentang pendidikan, dan pemaparan tahapan pembelajaran oleh guru pada orang tua siswa di 11 sekolah dampingan.

Program ini berhasil membawa sejumlah perubahan. Misalnya, kepala sekolah mulai terbuka tentang pelaksanaan program di sekolah termasuk pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selama ini kepala sekolah sebagai pengelola sangat tertutup. Dibandingkan sekolah lain, sekolah mitra sudah mulai membahas penggunaan anggaran. Sekolah mitra juga mulai membuka diri dengan mengundang orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah.

Komunikasi antarwarga, khususnya orang tua peserta didik dengan pihak sekolah, baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka di komite sekolah, ke depannya akan mengarah pada kualitas pertemuan lebih baik. Misalnya, membangun strategi tepat untuk mendampingi anak-anak mereka agar semakin maju dalam mengikuti pendidikan. ■ **Darmawan Denassa**, Direktur The Gowa Center

Berkumpulnya Perempuan Peternak se-Dunia

Akhir November lalu saya mengikuti *Global Gathering of Woman Pastoralist*, pertemuan para perempuan peternak sedunia. Kegiatan di India ini diikuti peserta dari banyak negara, antara lain Yordania, Spanyol, Kanada, Cina, Nigeria, Argentina, Kamerun, India, dan Rusia. Selain mempertemukan para perempuan peternak secara global, pertemuan ini juga menjadi tempat membagi pengalaman secara langsung.



Kami mendiskusikan pertanyaan, seperti mengapa memilih usaha berternak dan bagaimana hubungan dengan binatang piaraan. Pada umumnya kami sepakat bahwa ternak memberikan keuntungan bagi manusia. Juga bahwa ada hubungan erat antara manusia dengan hewan di mana keduanya saling membutuhkan. Demikian pula dengan alam semesta.

Saya juga sempat berdiskusi dengan peserta dari Afrika, seperti Nigeria, Kenya, Kamerun, Mali, dan Ethiopia tentang perubahan di sana. Mereka bercerita tentang bagaimana peran perempuan peternak di negara masing-masing dalam mendorong perubahan. Diskusi dan refleksi di sana melahirkan rencana kontribusi.

Beberapa rencana kontribusi kami disesuaikan kondisi di masing-masing negara. Misalnya, mendampingi daerah-daerah konflik dan perempuan marginal, membangun demokrasi sampai akar rumput, turut mengadvokasi kebijakan lokal yang lebih luas, pendidikan anak tentang pastoralist, mengembangkan permodalan, memerangi stigma tentang pastoralist, dan mengurangi urbanisasi.

Selama seminggu bersama teman-teman dari berbagai belahan bumi, saya mendapat banyak pembelajaran. Itu memberikan semangat pada saya untuk melakukan sesuatu bagi Jarpuk ataupun siapa saja yang bisa saya pengaruhi. ■ **Martha Kewuan**, Anggota Jarpuk Ina Fo'a Kupang, Peserta Pertemuan Woman Pastoralist di India.

Teman Perempuan untuk Korban Kekerasan

Jika tiap 25 November dunia merayakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, maka bagi Rifka Annisa tiap hari adalah perjuangan meniadakan kekerasan terhadap perempuan. Seperti namanya yang berarti Teman Perempuan, organisasi non-pemerintah yang berkantor di Yogyakarta ini setia mendampingi perempuan sejak 1993, tahun kelahiran mereka.

Rifka Annisa, yang berbentuk perkumpulan, ini ingin mewujudkan tatanan masyarakat adil jender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan. Cita-cita ini dibangun melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal.

Mereka memperjuangkannya melalui berbagai program. Pertama, kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan. Kedua, membangun sistem penanganan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Ketiga, menginisiasi pusat krisis berbasis masyarakat untuk

membangun kemandirian masyarakat mendukung perempuan dan anak korban kekerasan. Keempat, advokasi kebijakan responsif gender di tingkat lokal.

Selain dukungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, sejak 1997, organisasi ini juga memberikan konseling untuk laki-laki pelaku kekerasan. Rifka Annisa menganggap laki-laki merupakan mitra potensial dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Maka, Rifka Annisa melibatkan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini juga memberikan pelatihan, program magang serta kursus pendek untuk penguatan kapasitas pihak lain untuk mendampingi perempuan korban kekerasan ini. ■

Rifka Annisa
Jl. Jambon IV, Komplek Jatimulyo Indah
Yogyakarta 55242
Telp/Fax. 0274-553333
Website: www.rifka-annisa.or.id.

Menjawab Tantangan Kebutuhan Energi Terbarukan

Salah satu tantangan energi di masa depan adalah perlunya sumber energi terbarukan. Untuk itu, Hivos menjadikan isu terbarukan sebagai salah satu fokus programnya saat ini. Upaya mendorong sumber energi terbarukan ini, misalnya, melalui program biogas. Di Indonesia, program ini bernama Biru, singkatan dari Biogas Rumah.

Program dilakukan dengan cara memberikan dukungan pembiayaan untuk pembuatan biogas di tingkat komunitas. Satu sumber energi biogas ini bisa dipakai untuk beberapa rumah. Bali merupakan salah satu lokasi di mana program ini dilaksanakan, selain di Jawa dan Lombok.

Dukungan untuk sumber energi terbarukan sendiri hanya salah satu program Hivos, lembaga donor dari Belanda. Lembaga ini juga memberikan dukungan untuk program lain, seperti pelayanan keuangan dan pengembangan usaha, produksi berkelanjutan, demokratisasi dan hak asasi manusia, HIV dan AIDS, seni dan budaya, serta teknologi informasi dan media. Program ini dilaksanakan di hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat ini, Hivos mendukung lebih dari 800 organisasi mitranya yang tersebar di 30 negara. Bentuk dukungan ini selain secara finansial dan kelembagaan juga melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. ■

Hivos Asia Tenggara
Jl. Kemang Selatan XII no. 1, Jakarta Selatan 12560
Telp. 021-7892489, 78837577. Fax. 021-7808115
Website: www.hivos.nl, E-mail: hivos@hivos.or.id

people
unlimited
HIVOS

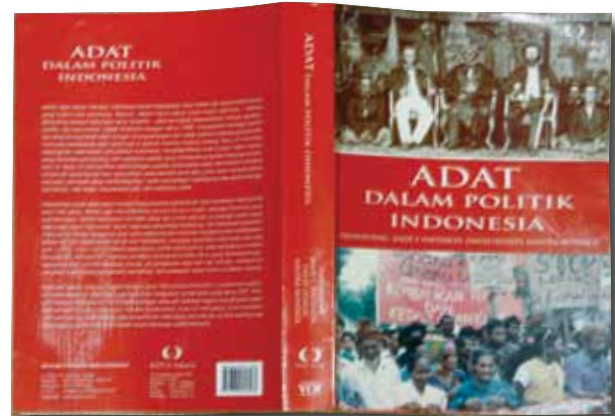
gambar dari: <http://rnnw.nl>

Kebangkitan Adat Dalam Politik Indonesia

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 merupakan awal kebangkitan masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di berbagai daerah, Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua, dan seterusnya menemukan momentum untuk menegaskan posisi mereka pada Negara. Di antara dengan menuntut penerapan hukum-hukum adat di daerah masing-masing. Buku berjudul Adat Dalam Politik Indonesia ini merangkum geliat kebangkitan masyarakat adat di Indonesia.

Buku terbitan Yayasan Obor Indonesia ini memaparkan hasil riset mendalam oleh para peneliti, yang hampir semuanya peneliti asing. Melalui riset di berbagai daerah, para peneliti ini memaparkan dalam empat bagian utama. Pertama, inspirasi dan dukungan komunitas internasional terhadap perjuangan masyarakat adat. Kedua, tekanan dan penindasan Orde Baru terhadap masyarakat adat. Ketiga, peluang dan tuntutan masyarakat adat setelah Reformasi. Keempat, peran masyarakat adat dalam pembentukan kebangsaan Indonesia sejak zaman bahuela.

Menurut buku ini, lahirnya gerakan masyarakat adat di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dukungan internasional, baik oleh lembaga donor maupun gerakan di tingkat global. Gerakan ini makin menguat ketika Orde Baru jatuh, meskipun sebagian masyarakat adat juga sudah mulai membuat gerakan dalam skala kecil di daerahnya. Selain itu, kebangkitan adat ini



juga muncul akibat adanya ketakutan berlebihan (xenophobia) penduduk setempat pada warga pendatang. Ini yang kemudian mengakibatkan lahirnya konflik etnis, baik terbuka ataupun tertutup, di beberapa daerah.

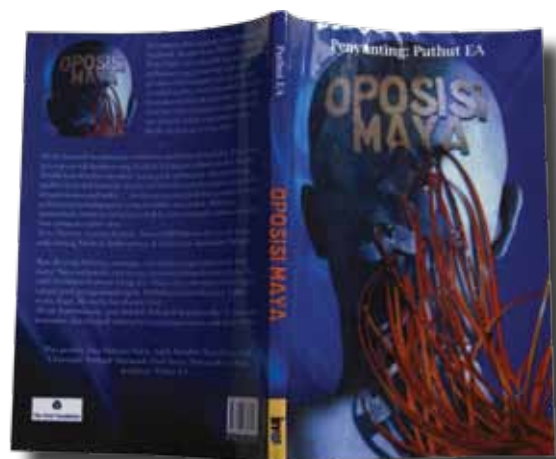
Dengan kekayaan data, fakta, dan analisis di dalamnya, buku setebal 456 halaman ini menjadi referensi penting tentang bagaimana gerakan masyarakat adat di Indonesia. Melalui buku ini, pembaca juga bisa belajar bagaimana menghindari konflik antar-etnis setelah menguatnya penguasa-penguasa dan sebaliknya, menggunakan kekuatan adat untuk memengaruhi perubahan lebih besar.

Perubahan Sosial Menggunakan Dunia Maya

Maraknya penggunaan internet, termasuk jejaring sosial, adalah peluang untuk mendorong perubahan sosial. Di Indonesia, penggunaan internet untuk mendorong perubahan sosial itu terjadi melalui beberapa contoh, seperti kasus 1 Juta Facebooker Dukung Bibit-Chandra dan solidaritas untuk Prita Mulyasari. Buku Oposisi Maya terbitan Insist Press Februari 2010 ini merangkum beberapa keberhasilan perubahan sosial tersebut melalui dunia maya itu.

Buku ini merupakan bunga rampai karya delapan penulis dengan latar belakang sama, penggiat perubahan sosial sekaligus pengguna jejaring sosial. Kegiatan mereka saat ini agak beragam: wartawan, editor, aktivis perempuan, maupun penggiat jurnalisme warga. Lewat buku setebal 143 halaman ini mereka membangunkan harapan bahwa perubahan melalui jejaring sosial di Indonesia bukanlah utopia.

Pengalaman perubahan sosial melalui jejaring sosial di Indonesia tidak hanya terjadi ketika internet dan jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, sedang ngetrend. Nezar Patria, mantan penggiat Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menceritakan bagaimana jejaring semacam mailing list menjadi alat bagi aktivis zaman Orde Baru untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Hal serupa diceritakan Linda Christanty yang kini bekerja di sindikasi berita Aceh Feature.



Buku ini dilengkapi pandangan sedikit berbeda dari Lies Marcos-Natsier dan Saleh Abdullah. Keduanya memberikan analisis kritis tentang bagaimana perubahan sosial dilakukan lewat dunia maya ini. Sebagai catatan reflektif, buku ini ditutup wawancara dengan Roem Topatimasang, dedengkot penggiat perubahan sosial di Indonesia. Roem menyimpulkan bahwa pada akhirnya, teknologi informasi termasuk internet dan jejaring sosial, hanyalah alat. Hanya senjata. Semua kembali pada siapa penggunanya. Ketika digunakan untuk mendorong perubahan sosial, internet dan jejaring sosial ini bisa sangat potensial kekuatannya.



Berbagi Keberhasilan di Konferensi Internasional

Desember 2010 lalu, ACCESS Tahap II berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang Kepemerintahan dan Pembangunan. ACCESS mengirimkan empat orang delegasinya, yaitu Farid Hadi (Senior Technical Officer DIP), Martha Hebi (PO Sumba), Ayu Ambarini (GCO) dan Sulaeman (Bappeda Jeneponto).

Konferensi ini diselenggarakan atas kerja sama Deakin University Australia dengan Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Dalam konferensi ini hadir sekitar 200 akademisi dari berbagai universitas di dunia, termasuk Indonesia. Hadir pula perwakilan Pemerintah Sumatera Barat, Departemen Dalam Negeri, swasta, LSM dan tokoh masyarakat.

Konferensi membahas hasil riset dan pengalaman pemerintahan maupun pembangunan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, khususnya perubahan yang terjadi. Dengan pemahaman dan latar belakang berbeda, peserta saling berbagi pengetahuan. Hasilnya diharapkan dapat mengisi makna pembangunan dan pemerintahan yang lebih baik serta berkontribusi pada pembangunan dunia.

Pada konferensi itu, ACCESS Tahap II menyampaikan dua buah presentasi. Pada presentasi pertama, ACCESS Tahap II menyampaikan abstrak yang ditulis Paul Boon, Direktur Program ACCESS Tahap II berjudul *Putting the demo back in democracy: Changing the role of citizens in decision making*. Pada sore harinya ACCESS Tahap II melanjutkan sesinya dengan menyelenggarakan presentasi kedua dan galeri workshop yang bertemakan *Strengthening Democratic Local Governance – How Appreciative Inquiry brings citizens and governments together in Indonesia*.

Secara keseluruhan semua program yang diisi ACCESS Tahap II mendapatkan sambutan antusias dari peserta. Peserta mengaku mendapatkan pemahaman baru terkait pembangunan demokrasi, khususnya penerapan AI dalam proses pembangunan yang demokratis di Indonesia.

Tim Bunnell, Peneliti urbanisasi dari Asia Research Institute, Universit Nasional Singapore berkomentar, *“Because it told stories of success, which is important in a decentralized, democratized Indonesian context where a lot of the stories that are told are very negative eg. KKN or poor capacity or elite capture of political processes.”* ■ Ayu Ambarini, Grant Contract Officer ACCESS Tahap II.

“Saya percaya perempuan bisa makin kuat dan berdaya.”

(Ismail Abubakar, pengurus Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima)

Menggunakan Community Centre Memperbaiki Pelayanan Publik

Kurang optimalnya layanan publik ini mendorong warga di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk mekanisme pengaduan berbasis masyarakat melalui *Community Center* (CC). Forum ini merupakan kelompok warga yang berusaha melakukan perbaikan layanan publik yang mereka terima. Warga Lombok membentuknya pada 2006 lalu.

Melalui CC, warga mengadu dan berkomunikasi terkait pengaduan pelayanan publik. Salah satu isu yang telah diperjuangkan adalah isu kesehatan dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan sebagai penggerak utama. Adanya CC telah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Yuni Riawati, Ketua Solidaritas Perempuan Mataram dan Koordinator Jaringan Masyarakat Sipil Lombok Barat menceritakan keberhasilan CC mendorong peningkatan layanan publik tersebut pada Temu Karya Bintang Pelayanan Publik di Kendari, 25-27 Oktober 2010. Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata ini dihadiri berbagai bintang (*champion*) pelayanan publik di kawasan Indonesia timur.

Dalam kegiatan yang diadakan AusAid, *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) Tahap II, dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) tersebut hadir pemangku kebijakan pelayanan publik seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan anggota DPRD kawasan Indonesia timur. Mereka saling bertukar pengalaman dan menjalin kerjasama dalam mewujudkan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Yuni, sebelum ada kesepakatan, warga sering mengeluhkan pelayanan Puskesmas. Keluhan kemudian didiskusikan di CC. Hasil diskusi lalu disampaikan pada pihak-pihak terkait, seperti Puskesmas, sebagai bahan dialog dengan warga. Biasanya, dialog dilaksanakan secara informal. Dari dialog-dialog informal tersebut lahir kesepakatan antara penyelenggara layanan (Puskesmas) dengan warga yang tertulis dalam piagam kesepakatan.

Isi kesepakatan tersebut, misalnya, mendorong adanya perubahan layanan, seperti jam kerja Puskesmas jadi lebih jelas dan penambahan loket di Puskesmas yang banyak dikunjungi warga. Saat ini ada 12 CC di 12 desa yang tersebar di enam kecamatan. Semua di Kabupaten Lombok Barat.

Isu lain yang juga menjadi perhatian CC adalah pengurusan akte nikah. Hal ini karena hampir 90 persen pasangan di Kabupaten Lombok Barat belum memiliki akte nikah. Untuk itu CC juga berperan menyosialisasikan pentingnya akte nikah bagi pasangan yang sudah menikah. CC juga mendorong pelayanan pembuatan akta nikah yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat.

Kustiah Ketua CC dari Desa Keker, Kecamatan Gunung Sari, menambahkan, CC masih berupa komunitas yang belum mapan. Komunitas ini beroperasi menggunakan dana iuran anggota. "Sebaiknya *Community Center* didorong agar menjadi organisasi mapan di tingkat desa (organisasi desa)," kata perempuan yang bekerja sebagai penjual nasi tersebut. Tujuannya, lanjut Kustiah, agar jangkauan serta kinerja CC lebih optimal. ■ **Agus Sumberdana**





Dahlia Jufri Menguatkan Pendapatan Perempuan

Penggiat perempuan di Bima mendirikan Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga (FP3M) Bima untuk meningkatkan pendapatan dan harkat perempuan. Dahlia Jufri, salah satu perintis FP3M Bima membagi pergulatannya pada **Luh De Suriyani**.

Bagaimana menemukan potensi desa dan warga di Madapangga?

Ketika saya menginjakkan kaki di Desa Ndano (sekretariat FP3M) pada 1985, saya merasa ada banyak potensi di sini tapi tak ada yang menggali. Sampai 2009 semua harapan

masih awang-awang. Dari pendampingan lembaga lain kami terinspirasi membentuk forum untuk perempuan.

Cara menggerakkan dan menentukan kegiatan?

Saya mengundang ibu-ibu. Mereka salut, karena banyak kader-kader dari program lain. Saya undang pengusaha kecil, peternak ayam yang belum punya kelompok. Muncul komitmen dan terbentuklah forum ini. Saya modal dengkul saja, tidak ada uang. Paling utama, mereka mau berkumpul dan diorganisir, berbagi pengetahuan saja dulu.

Seperti apa peluang yang ada?

Sifat kemadirian kelompok ini. Ada 14 kelompok ekonomi yang aktif meski belum pernah mendapat bantuan dari siapapun. Setelah 8 kelompok di Ndano, ACCESS Tahap II mengajak memperluas desa. Muncul 14 kelompok dalam 8 bulan sejak Januari 2009, seperti kelompok jajan, ternak, dan tenun. Tantangan kami, dan masih terukir di otak orang, kalau LSM datang pasti memberi bantuan. Bantuan modal tidak ada tapi peningkatan kapasitas.

Perubahan yang muncul?

Waktu itu saya belum menggunakan metode AI (Appresiative Inquiry, pendekatan yang menekankan pada potensi, red). Melihat masalah saja. Tidak pernah menjadikan potensi teman bisa dimanfaatkan. Sekarang sudah. Maka dalam kegiatan kelompok, para suami kini mendukung. Program tak bisa berjalan tanpa laki-laki. Mereka harus dilibatkan. Kami masih perlu banyak jaringan untuk berbagi ilmu. ■

Anak Mantu Membangun Desa

Membangun desa adalah cita-citanya yang tak bisa ditawar oleh Wa Ode Rinaliah, anak mantu dari Desa Koriri, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dia terpilih sebagai Kades sejak dua tahun. Harapan warga pada perempuan yang akrab dipanggil Ibu Rina ini dilatari oleh pribadinya yang kritis pada pembangunan desanya.

Ibu empat anak ini aktif di masyarakat, rajin dalam acara-acara adat serta mau berbagi ilmunya mengajari warga membuat kue. Ia juga membuka kedai kue bernama Kedai Nirwana untuk pemasaran kue produksi ibu-ibu yang dipasarkan seharga Rp 1.000 per buah.

Ketika menjadi kepala desa, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo, Kendari ini makin serius membangun desa. Ia menjemput bola ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melobi program-program bagi desanya. Tantangan dan kritik dari rivalnya saat pemilihan kepala desa ia jawab dengan kerja keras dan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi desanya.

Beberapa program desa yang sudah berjalan, antara lain bantuan sapi dari Dinas Sosial, penanaman pohon jati, memperbaiki kantor desa, pembangunan sarana mandi cucu kakus (MCK) dan penampungan air dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pemecah batu, serta pelatihan industri bersih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ia bercita-cita membangun ruang pameran untuk pengrajin bambu di desanya. "Perempuan harus bisa bangkit dan bekerja lebih baik mengubah lingkungannya," pesannya. ■ **Farid Hadi**. *STO Documenting, Influencing & Profiling*



"Dalam program kelompok, para suami kini mendukung. Mereka harus dilibatkan"

(Dahlia Jufri - pendiri Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga)



www.cartoonesia.web.id

Kuis

Jawab kuis edisi V/September 2010

1. UU No. 18/2008.
2. Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat
3. Sinar Lapandewa

Pemenang kuis

1. Naomy Malingora. Jalan Ahmad Yani nomor 145, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Telp. 085237306xxx.
2. LA Rini. Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Telp. 085299900xxx.
3. Wens Hasri. Jalan Shopping Center nomor 20, Kupang, NTT. Telp. 085237737xxx.

Kuis edisi ini

1. Di desa apa sekretariat FP3M berada?
2. Siapa nama lengkap Kepala Desa Koriri, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara?
3. Pada tanggal berapa pertemuan nasional Forum Lintas Aktor (FLA) diadakan?

Kirimkan jawaban Anda ke redaksi Buletin ACCESS melalui surat, email, ataupun SMS ke nomor telepon seluler 08179701808 dengan format jawaban: Kuis ACCESS# Jawaban 1/ Jawaban 2/ Jawaban 3/Nama dan Alamat Pengirim.

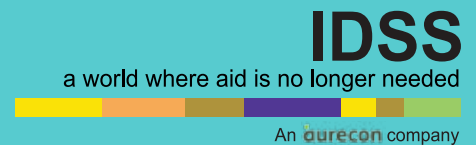
Contoh: Kuis ACCESS#Selemadeg/Dewi Saraswati/17 Agustus 2010/Agus Sumberdana Jl Pendidikan nomor 19xx, Denpasar, Bali.



ACCESS Tahap II mendorong generasi muda untuk peduli pada peningkatan kualitas warga



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Sekilas ACCESS Tahap II

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) adalah program inisiatif Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bernaung di bawah kerja sama “Kemitraan Australia Indonesia”.

ACCESS beroperasi sejak tahun 2002, dimana Tahap II telah dimulai pada bulan Mei 2008 untuk periode lima tahun ke depan. ACCESS Tahap II didesain berdasarkan keberhasilan-keberhasilan dari ACCESS Tahap I dengan memberikan fokus pada pemberdayaan warga dan organisasi mereka untuk berinteraksi aktif dengan pemerintahan lokal untuk meningkatkan dampak pembangunan.

Koordinator Provinsi dan Alamat Sekretariat Lapangan ACCESS Tahap II

Kantor Bali

Jl. Bet Ngandang I No. 1 XX
Sanur, Bali
Telp. 0361-288428
Fax. 0361-287509
Email info@access-indo.or.id,
Website: www.access-indo.or.id



“Sebagai bentuk kepedulian pada kelestarian lingkungan, Buletin ini dicetak menggunakan kertas 50 persen daur ulang”

NTB – Lombok

Australia-Indonesia Partnership Office
Jl. Flamboyan No. 2 Mataram - NTB
Phone/Fax: +62 370 646736
Email. arief@access-indo.or.id

NTB – Sumbawa

Jl. Gajah Mada No. 12B RT 01/RW 01
Kel. Rabadompu, Kota Bima,
Nusa Tenggara Barat
Telp. 0374-44516, Fax. 0374-646874
Email. arief@access-indo.or.id

Sulawesi Selatan

BTN Arakeke Permai Blok C No. 30
Bantaeng, Sulawesi Selatan
Telp: 0413-23117
Fax: 0413-22144
Email. sartono@access-indo.or.id

Sulawesi Tenggara

Jl. Betoambari No. 170E
Lorong Nusantara RT 03 RW 01
Kel. Katobengke, Kec. Betoambari
Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
Telp./Fax. 0402-2821026
Email. johnly@access-indo.or.id

NTT – Sumba

Jl. Palapa No. 31 Matawai
Waingapu, Sumba Timur
Telp./Fax. 0387-2564579/0387-61865
Email. ferdinand@access-indo.or.id

NTT – Timor

An Australian Government Aid Program
Australia-Indonesia Partnership Office
Jl Polisi Militer No. 2. Oepoi
Kupang - Nusa Tenggara Timur, 85111